

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi antara RUU PA dan UU TPPU dapat terlihat dalam beberapa aspek. RUU PA memberikan kontribusi dalam mempertegas sanksi hukum terutama terkait dengan perolehan aset dari hasil tindak pidana, dengan fokus pada pemulihan aset negara dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks perbandingan antara RUU PA dan UU TPPU, terlihat bahwa RUU PA dapat saling melengkapi dengan UU TPPU dalam penegakan hukum. RUU PA menitikberatkan pada sanksi objek tindak pidana untuk pemulihan aset negara, sementara UU TPPU lebih terfokus pada sanksi pidana kepada individu atau korporasi yang melakukan tindak pidana.
2. Pentingnya regulasi yang lebih komprehensif tentang perampasan aset tanpa pembedaan di Indonesia menjadi sorotan. Meskipun hukum positif telah mengatur kemungkinan perampasan aset hasil tindak pidana, namun mekanismenya masih terkendala oleh beberapa faktor seperti kondisi kesehatan pelaku atau ketidakmampuan menemukan bukti yang cukup di pengadilan. RUU Perampasan Aset, yang seharusnya menjadi solusi untuk memperbaiki sistem ini, menghadapi kendala serius dalam pembahasannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis menyarankan untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sudah hampir satu dekade pemerintah merumuskan RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini belum rampung. Secara formal RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah masuk ke dalam 189 RUU Prolegnas 2015-2019 serta dalam 248 RUU Prolegnas 2020-2024, namun hingga saat ini pembahasannya tidak sekalipun muncul dalam daftar prioritas tahunan.

Lima tahun masa jabatan DPR RI Periode 2015-2019 RUU Perampasan Aset belum pernah menjadi prioritas untuk segera dibahas. Hingga sampai periode tersebut berakhir dan dilanjutkan oleh DPR RI Periode 2020-2024 RUU Perampasan aset belum kunjung disahkan. RUU Perampasan Aset sangat penting disahkan karena berguna untuk menjangkau perkembangan kejahatan yang begitu pesat, terkhusus dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara melalui perampasan tanpa pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim, 2011, *Memorie Van Toelevting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, PT RajaGrafindo, Depok.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, cetakan ketiga, Storia Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Fithriadi Muslim, 2021, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasinya*, Cetakan Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta.
- Ian Smith, dan Tim Owen, et. al, 2003, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, Reed Elsevier Ltd, United Kingdom.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.
- Novianto M. Hantoro, 2012, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-21, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Wahyuni, Sri, Khoirudin, dan Rifki, 2020, [Pengantar Manajemen Aset](#), *Nas Media Mustika, Makassar*.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain.

United Nations Convention Against Corruption 2003.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

C. Sumber Lainnya

Ade Mahmud, 2020, 'Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Masalah Hukum*, Volume 49, Nomor 3.

Annisa Medina Sari, 2023, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya*, Unsu Fakultas Hukum, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada hari Senin, 16 Oktober 2023.

Anonim BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018, *Sinkronisasi-Harmonisasi* diakses dari <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi>.

Anonim, Sudut Hukum, 2017, *Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)* diakses dari <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umumtentang-tindak-pidana.html>.

Anonim, Tempo.co, 2022, *Kepala PPAK Dorong DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset Untuk Dibahas*, <https://nasional.tempo.co/read/1578678/kepala-ppatk-dorong-dpr-prioritaskan-ruu-perampasan-aset-untuk-dibahas>.

Anonim, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.

Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedure*, sebagaimana diakses dalam https://www.drugtext.org/library/articles/grantland_01.htm.

Fransiska Novita Eleanora, 2011, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh' *Jurnal Tindak Pidana Pencucian Uang*, Volume 26, Nomor 2.

Iqbal Basyari and Rini Kustiasih, *Satu Dekade RUU Perampasan Aset Terkatung-Katung - Kompas*, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/19/satu-dekade-ruu-perampasan-aset-terkatung-katung>.

Irwan Hafid, 2021, 'Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis of Law', *Lex Renaissance*, Volume 6, Nomor 1.

- July Wiarti, 2017, 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum'. *UIR Law Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Lonna Yohanes Lengkong, 'Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 9, Issue 3.
- Marfuatul Latifah, 2015, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia', *Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1.
- Matthew P. Harrington, 1994, 'Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture', *Yale Law & Policy Review*, Volume 12, Nomor 2.
- Novalinda Nadya Putri, dan Herman Katimin, 2021, 'Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia', *Fakultas Hukum Universitas Galuh: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9, Nomor 1.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 130/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jkt.Sel.
- R Lestari, 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aplikasi Internet*, Unpas, <http://repository.unpas.ac.id/38688/1/F.%20BAB%20II>.
- Ramelan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta, 2012.
- Rika Kumlasari Abdulgani, 'Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Litigasi*, Volume 24, 2023.
- Rofiq Hidayat, (2019) " Kasus Setnov, visi 'Asset Recovery' Belum Jadi Prioritas", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-setnov--visi-asset-recovery-belum-jadi-prioritas-lt5d0dbe1380889/>.
- Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Anang Setiyawan, www.interspin-as.wordpress.com.
- Rosyda, *Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya*, Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-aset/>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2015, *Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Hukum Indonesia*, Hukum Online. Com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-tanpa-pidana-dalam-hukum-indonesia-lt550190f5671f1/>.
- Widodo Ekatjahjana, 2022, *naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana*, detail/220/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-perampasan-aset-terkait-tindak-pidana/.

- Yeti Ganarsih, 2023, 'Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi', *Bahan Pemaparan pada Konferensi Hukum Nasional :Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*, Jakarta.
- Yunus Husein, 2010, 'Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 7, Nomor 4.